Sasaran 1.1.8 : Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon

Tabel 3.21
Capaian Sasaran 1.1.8 "Meningkatnya Peran Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon" Tahun 2020

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Target 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja 2020
				2018	2019	2020			
1.1.8	Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon	Peningkatan PDRB dari sektor industry	Persen	10,29	10,17	9,99	10,31	10,34	96,89%
		Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan	Persen	31,74	31,57	31,54	31,98	32,34	98,62%

Meningkatkan Peran Industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon menjadi faktor yang menunjang dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang ekonomi. Sasaran ini memiliki dua indikator kinerja dalam mengukur pencapaian yaitu : Peningkatan PDRB dari Sektor Industri dan Peningkatan PDRB dari sektor perdagangan.

Pencapaian Indikator ke-1 " Peningkatan PDRB dari sektor industri"

Pada Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Peningkatan PDRB dari sektor industri 10,31%. Berdasarkan data BPS PDRB Kota Cirebon tercapai pada posisi 9,99% Pencapaian ini belum mencapai target tahun 2020 atau capaianya sekitar 96,89%, kendati tidak memenuhi target 100% namun tetap berada dalam predikat pencapaian **Sangat Baik.** Tidak tercapainya nilai PDRB pada sektor industri pengolahan terjadi karena adanya perubahan besar peranan pada sektor industri pengolahan sebesar 0,17 poin, Penurunan ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang menghambat penyediaan bahan baku sehingga menyebabkan produksi tidak dapat optimal serta menurunnya daya beli masyarakat.

Pencapaian Indikator ke-2 " Peningkatan PDRB dari sektor Perdagangan"

Untuk indikator kedua Peningkatan PDRB dari Sektor Perdagangan berdasarkan data pada tahun 2020 tercapai 31,54% dari target 31,98% sehingga capaian kinerja yaitu 98,62%. Dengan demikian indikator Peningkatan PDRB dari Sektor Perdagangan pada tahun 2020 belum mencapai target akan tetapi bila dibandingkan dengan tahun 2019 maka adanya kenaikan sebesar 0,02 poin.kendati tidak mencapai 100% pencapaian ini masih berada pada predikat **Sangat Baik.**

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1.1.8 : Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon

Pencapaian Sasaran 1.1.8 memiliki rata-rata pencapaian indikator 97,65%, dengan predikat pencapaian Sangat Baik. Dalam mendukung pencapaian indikator Tujuan/Sasaran "Meningkatkan Peran Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM", tersebut Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon melaksanakan program-program sebagai berikut :

Program	Pagu	Realisasi	Capaian(%)
Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Sentra Industri	19.906.000,00	12.493.200,00	62,76%
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	142.211.000,00	137.411.000,00	96,62%
Program Metrologi Legal	214.170.000,00	151.331.900,00	70,66%
Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	156.000.000,00	156.000.000,00	100,00%
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi	446.308.000,00	423.397.000,00	94,87%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			84,98%

Pencapaian Sasaran "Meningkatkan peran industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon" tergambarkan dari rata-rata pencapaian kedua indikator kinerja sebagai alat ukur yaitu sebesar 97,76%. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel 3.22
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.1.8 "Meningkatnya Peran Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon" Tahun 2020

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Inovasi perdagangan dengan e-commerce E-Tuku (aplikasi perdagangan KOta Cirebon) mempermudah pemantauan harga pasaran dan juga memfasilitasi pembelian dan penjualan online • Dana stimulus bantuan bagi pelaku usaha kecil menengah membantu para pelaku usaha di tengah pandemi • Berjalannya program-program pendukung sasaran	• Kondisi Pandemi yang diakibatkan COVID-19 menurunkan aktivitas jual beli di berbagai sektor kecuali kesehatan, hal ini mempengaruhi sektor industry juga perdagangan	• Melakukan inovasi di sektor perdagangan serta mengoptimalkan inovasi yang telah ada yaitu E-Tuku • Mensosialisasikan gerakan jual beli online di wilayah lokal sebagai alternatif jual beli di masa pandemi, khususnya bagi pelaku UMKM agar menyediakan jasa penjualan online
	• Banyak pelaku usaha kecil menengah yang belum menggali potensinya secara optimal, sehingga usaha sulit	• Melakukan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha industri maupun UMKM lebih intensif lagi • Melakukan atau meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam meningkatkan perkembangan dari sektor

Faktor Pendorong		Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
		berkembang	industri maupun sektor perdagangan

Sasaran 1.1.9 Berkurangnya Penduduk Miskin

Tabel 3.23
Capaian Sasaran Berkurangnya Penduduk Miskin Tahun 2020

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	Realisasi 2020	Target 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja 2020
1.1.9	Berkurangnya Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin	Persen	8,88	8,41	9,52	8,18	7,13	83,61%

Pemberantasan kemiskinan menjadi salah satu agenda prioritas dalam kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, hal ini senada dengan isu pada skala nasional bahkan global dimana saat ini pemberantasan kemiskinan menjadi salah satu isu utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai pengganti Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir tahun 2015. Sebagai upaya pemberantasan kemiskinan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cirebon menetapkan sasaran yaitu “Berkurangnya Penduduk Miskin” untuk mendukung pencapaian misi ke-1. Sasaran tersebut memiliki tolak ukur pencapaian sebuah indikator kinerja “Presentase Penduduk Miskin” dimana dari tahun ketahun ditargetkan semakin menurun.

Pencapaian Indikator "Persentase Penduduk Miskin"

Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan persentase penduduk miskin sebesar 8,18% dari total penduduk wilayah Kota Cirebon,. Berdasarkan data yang dirilis BPS jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kota Cirebon pada tahun 2020 mencapai 30,61 ribu orang (9,52 persen), meningkat sebesar 3,81 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2019 yang sebesar 26,80 ribu orang (8,41 persen).

Berdasarkan realisasi tersebut maka pencapaian indikator dapat dihitung dengan menggunakan rumus $\frac{Target + (Target - Realisasi)}{Target} X\ 100\%$ = $\frac{8{,}18\% + (8{,}18\% - 9{,}52\%)}{8{,}18\%} X\ 100\%$ =83,61%, Pencapaian indikator pada sasaran ini belum memenuhi target. Pencapaian ini dipengaruhi berbagai faktor, selain program pada Dinas pengampu urusan sosial yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun para pemangku kepentingan di lingkup faktor tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan mempengaruhi kondisi kemiskinan di Kota Cirebon.

Gambar 3.9

Sumber : BPS Kota Cirebon 2020

Evaluasi Sasaran 1.1.9 "Berkurangnya Penduduk Miskin"

Pencapaian pada tahun 2020 belum mencapai target dengan tingkat pencapaian **83,16%** atau predikat pencapaian **Baik**. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pencapaian pada tahun 2020 menurun. Realisasi indikator persentase jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan, salah satu penyebeb utama adalah kondisi pandemic yang membuat banyak masyarakat kehilangan kesempatan bekerja. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah melaksanakan berbagai program lintas sektor serta bekerja sama dengan masyarakat maupun pihak swasta, beberapa program yang menunjang secara langsung sasaran ini adalahg sebagai berikut :

Program	Pagu	Realisasi	Capaian(%)
Program Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Rangka Penanganan PMKS	33.500.000,00	33.500.000,00	100%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	474.693.000,00	466.963.500,00	98%
Program Satu Data Keluarga Miskin	325.804.500,00	291.360.100,00	89%
Program Penanggulangan Korban bencana	1.522.289.500,00	1.353.129.800,00	89%
Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan	0,00	0,00	
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			94%

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dalam sasaran berkurangnya penduduk miskin, berikut adalah hal-hala yang mendukung sasaran, kendala serta strategi pemecahan masalah.

Tabel 3.24
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.1.9 “Berkurangnya Penduduk Miskin” Tahun 2020

Faktor Pendorong		Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Program-program dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang cukup signifikan dan dapat direalisasikan • Kepedulian dan solidaritas dari masyarakat yang mulai tumbuh untuk memberikan bantuan pada masyarakat misikin.		• Kondisi pandemi covid 19 berdampak pada sektro ekonomi khususnya berkurangnya kesempatan kerja , karena berbagai kebijakan seperti pembatasan social skala besar. • Rendahnya pendidikan di kalangan keluarga miskin yang menyebabkan menurun nya kesempatan mengakses sumber daya ekonomi •	• Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kerjasama dengan masyarakat G to S *(Government to Society)* serta pihak swasta yaitu G to B *(Government to Business),* hal ini tidak lain karena kemiskinan merupakan masalah krusial yang dipengaruhi banyak faktor sehingga upaya dari semua pemangku kepentingan dan masyarakat itu sendiri perlu terintegrasi dengan baik. • Penguatan dalam data keluarga miskin melalui program satu data keluarga miskin sangat urgent dilakukan, hal ini guna memastikan setiap program pendukung pemberantas kemiskinan bisa tepat sasaran

Sasaran 1.1.10 Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan

Tabel 3.25
Capaian Sasaran 1.1.10 "Meningkatnya pertanian, Kelautan dan Perikanan untuk mencapai Kedaulatan Pangan" Tahun 2020

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Target 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja 2020
				2018	2019	2020			
1.1.3	Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan /PPH	Poin	77,80	84	90,2	80,9	84,10	111,5
		Peningkatan PDRB dar sektor Pertanian	Persen	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	100%

Salah satu sasaran RPJMD Kota Cirebon pada misi 1 Wali kota Cirebon adalah "Meningkatnya Pertanian , Kelautan dan Perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan dengan dua indikator yang menjadi target sasarannya yaitu " Skor PPH Konsumsi" dan " Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB". Sasaran ini diampu oleh Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon yang mengacu pada misi 1 Wali Kota Cirebon pada RPJMD Kota Cirebon periode 2018 – 2023 yaitu "**Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang berdaya saing, Berbudaya dan Unggul Dalam segala Bidang".**

Pencapaian Indikator Ke-1

Pada indikator sasaran yang pertama yaitu " ***Skor PPH Konsumsi"***, diperoleh data bahwa Skor PPH Konsumsi Kota Cirebon pada tahun 2020, sementara masih menggunakan Skor PPH Konsumsi tahun 2019 yaitu sebesar 90,2 poin. Data skor PPH konsumsi tahun 2019 ini dirilis pleh BPS (hasil Susenas) pada pertengahan tahun 2020. Demikian juga skor PPH Konsumsi tahun 2020, baru akan dirilis oleh BPS pada

pertengahan tahun 2021. Pencapaian skor PPH konsumsi saat ini sudah melampaui target PPH konsumsi tingkat Kota yaitu sebesar 80,9 poin (111,5%) bahkan juga sudah melebihi target PPH Konsumsi tingkat provinsi Jawa Barat sebesar 86,3 poin. Pencapaian ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat Kota Cirebon akan keseimbangan konsumsi pangan baik yang bersumber dari energi, protein hewani, sayur, umbi-umbian dan kacang-kacangan sudah cukup bagus. Namun demikian konsumsi terhadap sayur -sayuran,umbi-umbian dan kacang-kacangan masih perlu ditingkatkan. Jika disandingkan dengan PPH konsumsi nasional maupun provinsi Jawa Barat, PPH Konsumsi Kota Cirebon masih di bawah capaian di tingkat provinsi maupun Nasional. Untuk PPH Konsumsi Provinsi Jawa Barat mencapai 85,2 poin, sedangkan PPH Konsumsi Tingkat Nasional mencapai 91,3 poin. Namun jika dilihat dari capaian yang didapatkan oleh pemerintah Daerah Kota Cirebon, PPH Konsumsi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik

Pencapaian Indikator ke-2

Indikator sasaran yang kedua yaitu ***"Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB."*** Data PDRB Sektor pertanian pada tahun 2020 sampai awal tahun 2021 ini juga belum dirilis oleh BPS. Target PDRB sektor pertanian pada tahun 2020 sebesar 0,33 poin. Realisasi sementara target PDRB sektor pertanian Kota Cirebon adalah 0,33 poin dengan menggunakan data yang diukur dan dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada pertengahan tahun 2020. Dengan demikian capaian realisasi pada inidikator ini adalah sebesar 100% didapat dari $\frac{Realisasi}{Target} X\ 100\%$. Dengan adanya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor pertanian ini dapat memberikan informasi tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Cirebon, meskipun sektor pertanian bukan merupakan potensi utama Kota Cirebon dikarenakan potensi lahan pertanian yang semakin hari semakin mengalami penurunan, namun demikian dapat dimaksimalkan dari segi produktivitasnya.

Evaluasi Sasaran 1.1.10 "Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan"

Sebagai bentuk upaya dalam pencapaian target sasaran yang sudah diamanatkan melalui Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, ada beberapa program prioritas dan program penunjang yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

Program	Pagu	Realisasi	Capaian(%)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.187.565.000,00	1.171.766.600,00	98,67%
Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	382.255.600,00	382.255.600,00	100,00%
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan	3.446.000,00	3.446.000,00	100,00%
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	600.392.400,00	600.130.000,00	99,96%
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.024.157.000,00	1.001.453.500,00	97,78%
Program Pencegahan Penyakit Hewan	159.721.000,00	159.721.000,00	100,00%
Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	75.569.600,00	75.569.600,00	100,00%
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya	933.283.000,00	925.005.000,00	99,11%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			99,44%

Berdasarkan data capaian kinerja dari dua indikator sasaran di atas, dapat diidentifikasi capaian kinerja untuk sasaran RPJMD misi 1 “Meningkatnya Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan” tahun 2020 sudah cukup bagus yaitu 105,75%. Walaupun capaian kinerja dari indikator sasaran ini sudah lebih dari 100%, namun tetap perlu dipertahankan bahkan lebih dimaksimalkan lagi. Oleh karena itu perlu diupayakan langkah-langkah inovatif yanag dapat meningkatkan nilai capaian kinerja dari indikator sasaran ini, Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel 3.26
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.1.10 “Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan" Tahun 2020

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Keberhasilan program –program yang mendukung sasaran strategis 1.1.10 • kesadaran masyarakat Kota Cirebon akan keseimbangan konsumsi pangan baik yang bersumber dari energi, protein hewani, sayur, umbi-umbian dan kacang-kacangan sudah cukup bagus • Optimalnya	• Berdasarkan data Penduduk Kota Cirebon masih kurang dalam Konsumsi Sayuran dan buah-buahan	• Sosialisai yang lebih intensif terkait gerakan makan buah dan sayur dengan sasaran utama anak sekolah dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu agar mampu menciptakan menu inovasi penyajian makanan yang B2SA (Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman

Faktor Pendorong		Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
produktivitas lahan pertanian di Kota Cirebon		• Lahan Pertanian yang Sempit dan terbatas	• Lebih intensif lagi dalam membina para petani dan masyarakat agar mampu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dengan cara melakukan bimbingan teknis, pelatihan yang efektif, efisien dan inovatif dalam pengembangan sektor pertanian, terutama dalam pemanfaatan lahan-lahan pekarangan keluarga

Sasaran 1.1.11 Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif

Tabel 3.27
Capaian Sasaran 1.1.11 "Meningkatnya Peran Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan Ekonomi Inklusif" Tahun 2020

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Target 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja 2020
				2018	2019	2020			
1.1.11	Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	Meningkatnya PDRB dari sektor pariwisata	Persen	n/a	7,72	7,51	5,63	5,87	132,90%

Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi sasaran yang mendukung Misi ke-1, sasaran ini memiliki 1 indikator sebagai tolak ukur pencapaian yaitu meningkatnya PDRB dari sektor pariwisata. PDRB sektor pariwisata lazim dijadikan sebuah gambaran bagaimana peran pariwisata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomis inklusif, karena memuat data pengukuran kontribusi produksi dari sektor pariwisata.

Pencapaian Indikator "Meningkatnya PDRB dari Sektor Pariwisata"

Capaian Kinerja Kontribusi pariwisata tahun 2020 terhadap PDRB nilai capaian kinerjanya mencapai 132,90% atau **"SANGAT BAIK"**, kendati realisasi indikator dengan realisasi 7,51% menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 7,72% . Angka tersebut diperoleh dari Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (persen) 2016 - 2020, penjumlahan pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa lainnya pada Buku Produk Domestik Bruto Kota Cirebon Menurut Lapangan Usaha 2016 - 2020 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Cirebon pada Bulan Maret 2021.

Berikut adalah sektor pendukung penyumbang nilai PDRB Pariwisata:

1. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Penyediaan akomodasi dan makan minum menyumbang nilai sebesar 5,29%. Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

- Penyediaan Akomodasi

Sub kategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

- Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan sub kategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran self service atau restoran take away, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

2. Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya menyumbang nilai sebesar 2,39%. Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan empat kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

- **Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi**

  Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi berkategori R di dalam KBLI 2009. Kategori ini meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan

kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Berikut adalah data nilai Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata:

Gambar

Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Sumber Data : BPS Kota Cirebon

Evaluasi Sasaran 1.1.11 : Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif.

Pencapaian sasaran Meningkatnya peran pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif dengan nilai 136% adalah sangat baik, kendati dari sisi realisasi indikator terjadi penurunan sebesar 0,14% yang semula 7,72% menjadi 7,58%, namun realisasi ini masih melebihi target akhir dari RPJMD yaitu 5,87%. Hal ini merupakan kabar baik sekaligus tantangan tersendiri untuk tetap mempertahankan

pada tahun-tahun berikutnya. Program-program yang mendukung Sasaran 1.1.11 ini adalah sebagai berikut :

Program	Pagu	Realisasi	Capaian(%)
Program Pengembangan Kepariwisataan	289.800.000,00	4.080.204.000,00	1407,94
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			1407,94%

Dalam rangka menganalisas permasalahan serta upaya pemecahan masalah tersebut Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel 3.28
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.1.11 “Meningkatnya Peran Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan Ekonomi Inklusif.” Tahun 2020

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Peningkatan anggaran yang cukup signifikan sebagai upaya peningkatan efektifitas program dalam menghadapi kondis pandemi Covid 19 • Akses wilayah KOta Cirebon yang strategis menjadi salah satu keunggulan dalam industri kepariwisataan atau kunjungan masuk pada Kota Cirebon hal ini bahkan tetap cukup tinggi walau dalam kondisi pandemi	• Proyeksi meningkatnya PDRB dari sektor pariwisata menurun 0,14 persen dari tahun sebelumnya, hal ini karena dampak dari kondisi Pandemi *Covid 19.* • Penerapan protokol kesehatan melalui PSBB mengakibatkan menurun nya jumlah jam operasional industri terkait sektor pariwisata seperti jasa makanan dan minuman yang berkontribusi pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku.	• Melakukan inovasi dalam sistem jual beli khususnya jasa makanan dan minuman sebagai salah satu komponen sektor pariwisata dalam PDRB ADHB yaitu secara online atau dengan adaptasi kebiasaan baru. • Penerapan protokol kesehatan di berbagai sektor dalam rangka menjamin kemananan pengunjung yang datang ke wilayah Kota Cirebon.

Sasaran 1.1.12 Meningkatnya Kerukunan antar Umat Beragama

Tabel 3.29
Capaian Sasaran 1.1.12 "Meningkatnya Kerukunan antar Umat Beragama" Tahun 2020

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Target 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja 2020
				2018	2019	2020			
1.1.12	Meningkatnya kerukunan umat Beragama	Konflik antar umat beragama	Kasus	0	0	0	0	0	100%

Sasaran Meningkatnya kerukunan umat Beragama dengan indikator kinerja Konflik antar umat beragama menjadi salah satu tolak ukur dalam mewujudkan Misi ke-1. Kualitas sumber daya manusia ditandai salah satunya adalah dengan terciptanya kondisi masyarakat beradab yang penuh toleransi dan dapat hidup berdampingan dengan damai serta minim konflik.

Pencapaian Indikator "Konflik antar Umat Beragama"

Pada Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan jumlah konflik antar umat beragama pada target maksimal yaitu 0 / nol kejadian. Target ini terbilang cukup tinggi karena potensi terjadinya konflik di Kota Cirebon tidaklah rendah mengingat heterogen nya komposisi demografi masyarakat di Kota Ini. Namun patut disyukuri berdasarkan data yang disampaikan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2020 tidak tercatat satupun kejadian terkait konflik antar umat beragama, maka pencapaian atas indikator ini adalah 100%. Dengan predikat **Sangat Tinggi.**

Evaluasi Sasaran 1.1.12 "Meningkatnya kerukunan umat Beragama"

Pencapaian Sasaran meningkatnya kerukunan umat beragama berada dalam kategori atau predikat sangat tinggi dimana satu-satunya indikator sebagai tolak ukur pencapaian sasaran dapat dilaksanakan sepenuhnya. Keberhasilan ini sekaligus menjadi tantangan kedepan nya untuk tetap dipertahankan dimana kondisi demografi

Kota Cirebon yang heterogen dan atmosfer konflik khususnya SARA di tingkat nasional yang sangat fluktuatif menjadi celah kemungkinan yang cukup tinggi terjadinya konflik antar umat beragama yang dapat mencederai kerukunan umat beragama.

Dalam rangka mendukung capaian sasaran Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengimplementasikan Program sebagai berikut :

Program	Pagu	Realisasi	Capaian(%)
Program Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Kerukunan Hidup Umat Beragama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	5.000.000,00	500.000,00	10%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			10%

Kendati pencapaian target berhasil 100% namun kendala dan tantangan di masa yang akan datang perlu menjadi perhatian.

Tabel 3.20
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.1.12. “Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama” Tahun 2020

Faktor Pendorong		Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Telah terjalinya hubungan baik antar Umat Beragama di Kota Cirebon • Tokoh masyarakat dari kalangan Umat Beragama memiliki komunikasi yang baik		• Isu Nasional yang berpotensi mempengaruhi kondisi di daerah Kota Cirebon • Pemberitaan *Hoax* dari pihak –pihak yang tidak bertanggung-jawab	• Meningkatkan fasilitasi penguatan lembaga keagamaan, meningkatkan peran tokoh agama dalam memperkuat implementasi nilai-nilai keagamaan. • Memfasilitsi kegiatan dialog antar umat beragama • Memperkuat Koordinasi dengan saber Hoax KOta Cirebon • Memperkuat Koordinasi dalam Forum Kerukunan Umat Beragama

Sasaran 1.1.13 Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal

Tabel 3.31
Capaian Sasaran Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal
Tahun 2020

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan			Realisasi	Target	Target Akhir	Capaian Kinerja 2020
				2018	2019	2020	2020	RPJMD	
1.1.3	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	persen	n/a	53,69	60,8	74,01	80,61	82,15%

Sasaran "Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal" dengan Indikator : Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan ditetapkan dalam rangka mendukung tujuan dan Misi ke-1. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal menjadi strategis mengingat pada perencanan jangka menengah 2019-2023 Visi Kota Cirebon adalah "SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah".

Pencapaian Indikator "Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan"

Pada Tahun 2020 target dari indikator "Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan" adalah 74,01%, objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan dihitung dari 10 jenis objek yang berbeda yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Pada tlahun 2020 Dinas Kepemudaan, Olahrga, Kebudayaan, dan Pariwisata melakukan upaya pendataan sekaligus pelestarian dan menghasilkan kesimpulan atas objek pemajuan kebudayaan yang aktif (lestari) dan tidak aktif sebagai berikut :

Tabel 3.32

Objek Pemajuan Kebudayaan

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELIPUTI:	YANG ADA	YANG AKTIF
a. Tradisi Lisan	32	20
b. Manuskrip	10	5
c. Adat istiadat	27	19
d. Ritus	28	17
e. Pengetahuan Tradisional	35	23
f. Teknologi Tradisional	9	9
g. Seni	36	20
h. Bahasa	10	10
i. Permainan Rakyat	20	3
j. Olahraga Tradisional	10	6
Jumlah	**217**	**132**
Presentase		**60,8%**

Sumber : Laporan Pemajuan Objek Kebudayaan DKOKP 2020, di olah

Gambar 3.8
Persentase Keaktifan Objek Pemajuan Kebudayaan

Dari data ini dapat dihitung bahwa realisasi pemajuan kebudayaan mencapai 60,8% dari target 74,01%, berarti tingkat pencapaian indikator adalah 82,15% , berada dalam predikat pencapaian "**Baik"**.

Evaluasi Sasaran 1.1.13 : Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal

Tingkat pencapaian terhadap sasaran yang ditunjukan dengan tingkat capaian indikator pada tahun 2020 tidak begitu signifikan, pencapaian predikat Baik (82,15%) menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kota Cirebon, dalam rangka mendukung kinerja pada sasaran ini terdapat beberapa program yang mendukung langsung terhadap sasaran sebagai berikut :

Program	Pagu	Realisasi	Capaian(%)
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	0	0	0%
Program Pegelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	979.815.000,00	956.187.800,00	97,59%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			97,59%

Sebagai upaya melakukan perbaikan kinerja, maka berikut adalah analisa faktor yang mendorong, permasalahan, serta upaya atau strategi pemecahan masalah tersebut.

Tabel 3.33
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.1.12. “Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama”

Faktor Pendorong		Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Peningkatan efektifitas pelaksanaan program dibandingkan tahun sebelumnya. • Mulai adanya kolaborasi masyarakat dalam pelestarian		• Sangat banyak dan kompleksnya data objek pemajuan kebudayaan disatu sisi keterbatasn sumber daya dalam melakukan stimulus pelestarian terhadap objek kebudayaan local tersebut. Penetapan target yang terlampau tinggi, dikarenakan sebagai sebuah ktarget di tahun pertama RPJMD, kondisi awal (2018) tidak ditemukanya data sementara objek kebudayaan di Kota Cirebon kompleksitasnya cukup tinggi	• Meningkatkan pelestarian dan legalitas seni dan budaya local • Perlindungan, pengembangan dan penataan cagar budaya • Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan local

Sasaran 1.1.14 : Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan

Tabel 3.34
Capaian Sasaran 1.1.14 "Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan" Tahun 2020

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Target 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja 2020
				2018	2019	2020			
2.1.10	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Kurang Berkembang	Jumlah	0	0	0	0	0	100%
		Berkembang	Jumlah	8	8	22	9	9	244,5%
		Cepat Berkembang	Jumlah	13	13	15	13	13	115,4%

"Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan" menjadi salah satu sasaran yang mendukung terwujudnya Misi 1 Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul salah satu gambaran kondisi yang ada adalah dengan tingkat kualitas pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan. Sasaran ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan sejumlah indikator yang beberapa diantaranya merupakan sub indikator yang membangun indikator utama lainya,sub indikator tersebut berada pada tingkat kelurahan, sehingga dalam uraian Laporan Kinerja ini akan diuraikan indikator pada tingkat Kota sebagai bentuk rekapitulasi dari indikator yang tercantum di 22 kelurahan, berikut adalah indikator tersebut :

1. Kualitas Pemberdayaan kelurahan Kurang Berkembang
2. Kualitas Pemberdayaan kelurahan Berkembang
3. Kualitas Pemberdayaan kelurahan Sangat Berkembang

Pencapaian Indikator ke-1 "Kurang Berkembang"

Pada Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Kualitas Pemberdayaan Kelurahan Kurang Berkembang yang ditunjukan dengan kondisi perkembangan kelurahan kurang berkembang adalah 0 atau tidak ada kualitas pemberdayaan kelurahan yang kurang berkembang. Dalam tiga kategori kualitas pemberdayaan kelurahan, kurang berkembang adalah tingkat terendah, oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Cirebon optimis untuk menargetkan tidak ada kelurahan yang berada pada kondisi tersebut. Berdasarkan hasil penilaian yang diperkuat dengan Berita Acara Nomor : 414.4/048-DSPPPA/2020 Tentang Hasil Evaluasi Perkembangan Kelurahan Pada 22 Kelurahan Di Kota Cirebon Tahun 2020, bahwasanya jumlah kualitas pemberdayaan kelurahan yang ditunjukan dengan tingkat perkembangan kelurahan adalah 0 kelurahan, maka realisasi tersebut mencapai target, yaitu sebesar 100% dengan predikat **Sangat Baik.**

Pencapaian Indikator ke-2 " Berkembang"

Pada Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Kualitas Pemberdayaan Kelurahan Kurang Berkembang yang ditunjukan dengan kondisi perkembangan kelurahan berkembang adalah 7 kelurahan. Berdasarkan hasil penilaian yang diperkuat dengan Berita Acara Nomor : 414.4/048-DSPPPA/2020 Tentang Hasil Evaluasi Perkembangan Kelurahan Pada 22 Kelurahan Di Kota Cirebon Tahun 2020, bahwasanya jumlah kualitas pemberdayaan kelurahan yang ditunjukan dengan tingkat perkembangan kelurahan pada posisi berkembang adalah 7 kelurahan, sementara pada posisi sangat berkembang adalah 15 kelurahan, sehingga dapat dikatakan bahwa 15 kelurahan yang sangat berkembang melewati atau juga berada pada kondisi berkembang sehingga total kelurahan berkembang dalam rangka pengukuran kinerja adalh berjumlah 22. Realisasi tersebut melebih target, yaitu sebesar 275% dengan predikat **Sangat Baik.**

Pencapaian Indikator ke-3 " Sangat Berkembang"

Pada Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan Kualitas Pemberdayaan Kelurahan Sangat Berkembang yang ditunjukan dengan kondisi

perkembangan kelurahan sangat berkembang adalah 13 kelurahan. Berdasarkan hasil penilaian yang diperkuat dengan Berita Acara Nomor : 414.4/047-DSPPPA/2019 Tentang Hasil Evaluasi Perkembangan Kelurahan Pada 22 Kelurahan Di Kota Cirebon Tahun 2019, bahwasanya jumlah kualitas pemberdayaan kelurahan yang ditunjukan dengan tingkat perkembangan kelurahan pada posisi sangat berkembang adalah 15 kelurahan, Realisasi tersebut melebih target dari 13 kelurahan , yaitu sebesar 115,4% dengan predikat **Sangat Baik.**

Evaluasi Sasaran 1.1.14 "Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan"

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan tiga (3) indikator memiliki rata-rata pencapaian sebesar 163,4% pencapaian ini berada dalam predikat **Sangat Baik**. Pencapaian yang sangat baik ini didukung Program sebagai berikut :

Program	Pagu	Realisasi	Capaian(%)
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat	1.026.995.000,00	1.000.840.100,00	97,45%
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan	212.246.000,00	205.688.000,00	96,91%
Program Pembangunan SaranaPrasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Kecamatan	27.989.558.750,00	27.113.781.031,00	96,87%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			97,08%

Kendati pencapaian Sasaran ini sudah Sangat Baik diperlukan upaya untuk mempertahankan kinerja ataupun meningkatkanya di tahun yang akan datang. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel 3.35
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.1.14 "Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat"

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Keberhasilan Program pemberdayaan kelurahan secara efektif dan efesien • Meningkatnya Koordinasi antara Perangkat Daerah pemangku kepentingan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan termasuk kelurahan didalamnya • Prestasi tingkat Provinsi dan Nasional dalam Lomba Kelurahan	• Urbanisasi yang cukup tinggi meningkatkan jumlah penduduk tidak tetap di kelurahan yang berada pada wilayah perkotaan. Kepadatan tinggi yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan lingkungan kumuh dan kontra produktif dengan keberdayaan. • Program pemberdayaan yang terbatas masih belum bisa menjangkau seluruh masyarakat di tingkat kelurahan. • Masih terdapat kelompok masyarakat yang enggan untuk memanfaatkan program terkait	• Menjaga koordinasi antar pemangku kepentingan terjalin dengan baik sehingga program yang diselenggarakan dapat selaras dengan praktik di lapangan, • Selain pemangku kepentingan antara G to G (Government to Government), perlu ditingkatkan kembali koordinasi dan sinergitas dengan objek dari pemberdayaan yaitu masyarakat kelurahan itu sendiri, sehingga selain menjadi obyek, masyarakat pun

Faktor Pendorong		Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
		pemberdayaan masyarakat.	terlibat sebagai subjek atau pelaku pemberdayaan. • Melakukan Inovasi di bidang pemberdayaan Masyarakat, serta fokus pada pemberdayaan masyarakat yang dapat menjadi solusi dalam isu sosial-ekonomi yang ada di masyarakat, khususnya permasalahan ekonomi. • Menyikapiperencanaan di lingkup pemberdayaan masyarakat sesuai dengan demografi kependudukan,khususnya dalam menyikapi bonud demografi di Kota Cirebon.

Misi 2 "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif"

Sesuai dengan arahan Misi 6, RPJPD, yaitu **(6) "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Sarana Prasarana Umum Diikuti Dengan Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa",** yang ditandai dengan :

a. Terwujudnya pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa, efektif dan efisien.
b. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang taat pada hukum dan mampu mengayomi masyarakat dengan optimal.
c. Organisasi pemerintahan yang tertata dengan baik dan berfungsi dengan optimal.
d. Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional dan memiliki produktifitas yang tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui instansi masing-masing.

Misi ini merupakan arahan untuk meningkatkan daya saing pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Sebagai tolak ukur dalam mewujudkan Misi 2, ditetapkan 1 tujuan dan 11 sasaran yang akan diuraikan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan

Tabel 3.25
Capaian Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan

NO	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Target 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja 2020
				2018	2019	2020			
2.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi *(Indikator Kinerja Utama)*	Poin	57,29	71,21	76,54	65	80	107,48%

Tujuan "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan" diukur dengan sebuah Indikator : "Indeks reformasi Birokrasi". Indeks ini relevan menjadi tolak ukur dalam menilai secara umum kapabilitas dan manajeman Pemerintahan di suatu Instansi karena cakupan faktor dalam pengukuran indeks reformasi cukup luas dengan mengukur 7 faktor dalam dimensi proses yaitu : manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, dan penguatan pengawasan. Disamping itu juga diukur faktor dalam dimensi hasil yaitu : kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta kualitas pelayanan publik.

Pencapaian Indikator Tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi"

Pada Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Cirebon menargetkan indeks reformasi birokrasi pada poin 65. Berdasarkan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nomor Birokrasi Kota Cirebon mendapatkan poin Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi sebesar 76,54 Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.37

Sumber : Laporan Hasil PMPRB Tahun 2020, Inspektorat Daerah Kota

Dengan poin Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 74, maka pencapaian indkator kinerja pada tahun 2020 tersebut melebih target yaitu sebesar 118,33% dengan predikat pencapaian **Sangat Baik**.

Evaluasi Tujuan ”Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan”

Pencapaian Indikator dari tujuan ”Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi Dalam Manajemen Pemerintahan” yang melebihi target, merupakan hasil dari semangat melakukan reformasi birokrasi di Kota Cirebon. Salah satu kegiatan yang memicu semangat reformasi birokrasi ini diantaranya adalah penandatangan bersama oleh Wali Kota dan Kepala Perangkat Derah terkait Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi pada pertengahan tahun 2019. Dimana komitmen ini menjadi salah satu *spirit* dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan pencapaian saat ini, Pemerintah Daerah Kota Cirebon memberikan perhatian lebih pada faktor-faktor pengukuran yang pada saat evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2019 masih berada di bawah rata-rata pencapaian faktor lainya, diantaranya adalah pada faktor Penataan tatalaksana, dimana nilai maksimal 5 namun hanya mendapat poin 2,88. dari beberapa sub faktor nilai terendah ada di sub faktor kualitas pengelolaan kearsipan. Selain itu mempertahankan faktor yang dinilai cukup tinggi dalam evaluasi pada tahun 2019 diantaranya :

1. Faktor Penatan Organisasi dan Penguatan, dari total 6 mendapat poin 5,74
2. Faktor Peataasn Sistem Manajemen ASN, dari total 15 Poin mendapatkan poin 12,25
3. Faktor Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN dari total 10 poin mendapatkan poin 8,25

Untuk menunjang tujuan pada Misi 2, telah ditetapkan 11 sasaran yang sinergis, dimana setiap sasaran pengukuran, analisa dan evaluasinya akan diuraikan satu persatu secara rinci sebagai berikut :